

BAB I

Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Di Negara Demokrasi, pemilihan umum dianggap sebuah lambang serta sebagai tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, dan sebagainya. Di banyak negara Dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang di diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurangbebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan (Budiarto, 2008: 461) .

Pemilihan umum dalam negara demokrasi sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka, manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat apa itu DPR ataupun DPRD dipilih, maka sistem pemilihan umum memberi jumlah suara kedalam jumlah kursi. Sementara itu, pemilihan presiden, gubernur, dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam pemilihan umum, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dengan melihat kenyataan seperti itu maka betapa pentingnya pemilihan umum dalam sebuah demokrasi (Gaffar, 1999: 255).

Di Indonesia, salah satu faktor utama mendorong munculnya kebijakan desentralisasi pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru sebagai mana tertuang di dalam UU No.22 dan 25 Tahun 1999 adalah untuk mempercepat proses demokrasi dan memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Melalui transfer kekuasaan dan otoritas ke daerah, diharapkan bisa membuat daerah memiliki

bargaining position yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah tidak hanya berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mereka sendiri. Pandangan seperti ini didasari oleh pemikiran bahwa para pemegang kekuasaan di daerah lebih tahu selera masyarakat di daerah dari pada pemegang kekuasaan (Marijan, 2010: 174).

Demokrasi adalah hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Runtuhnya orde membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokrasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Dengan diadakannya sistem demokrasi di Indonesia, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing dan bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan umum (Pemilu). Di Indonesia telah berkali-kali dilangsungkan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi Pancasila. Satu kali sewaktu pemerintahan orde lama dan enam kali sewaktu pemerintahan orde baru, serta tiga kali selama era reformasi. Kemudian pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 2014 (Budiarjo, 2008: 47).

Pemilihan umum menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang akan diisi disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat

pemerintahan, sampai kepala desa. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Lebih spesifik, Pemilu ini berusaha membangun satu mekanisme, suatu cara, suatu prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemegang kekuasaan yang dari mekanisme atau cara tersebut, memberi masyarakat alasan untuk memilih mereka (Budiardjo, 2008: 116).

Pemilu tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia kembali melakukan pesta demokrasi, pemilu akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014. Pesta demokrasi juga dilakukan Masyarakat Bangkalan, pemilihan umum legislatif di Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2014 mengemukakan daftar jumlah pemilih sebanyak 960.785 orang yang masuk sebagai calon pemilih yang berusia 17 tahun saat pelaksanaan hari jadi pemilu. Para calon pemilih tersebar di 2.557 tempat pemungutan suara (TPS) di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Pemilihan umum di Bangkalan mempunyai enam Daerah pemilihan (dapil) dan mempunyai jatah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 50 kursi dan memiliki partai politik sebanyak 12 partai politik. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota dalam pemilihan umum legislatif kabupaten Bangkalan 2014 adalah sebagai berikut; Daerah pemilihan Bangkalan 1 meliputi, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah dan Kecamatan Arosbaya, dapil ini mempunyai jatah 9 kursi. Daerah pemilihan Bangkalan 2 meliputi Kecamatan Geger, Kecamatan Kelampis dan Kecamatan Sepuluh, dapil 2 ini mempunyai jatah 9 kursi. Daerah pemilihan Bangkalan 3 meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Konang dapil ini mempunyai 8 kursi. Daerah Pemilihan 4 meliputi Kecamatan Blega, Kecamatan Modung dan Kecamatan Galis dapil ini mempunyai 9 kursi. Daerah pilih Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanah Merah dapil ini mempunyai 7 kursi. Dapil Bangkalan 6 meliputi Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang dan Kecamatan Tragah dapil ini mempunyai jatah 8 Kursi. Sukses pemilihan legislatif seringkali meliputi dengan cara bersosialisasi dan partisipasi pada masyarakat, atau yang dikenal istilah kampanye. sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota

masyarakat. Proses sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun tetangga ataupun dalam pergaulan masyarakat. Metode sosialisasi dapat berupa pendidikan politik, dan indokrinasi politik. Pendidikan politik melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat mengenal nilai, norma dan simbol politik. partisipasi politik di sebut juga kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik (Rush and Althoff, 2011: 121).

Proses sosialisasi dan partisipasi politik khususnya di Madura pasti tidak jauh dari kata uang atau biasa disebut money politik yang belakangan menjadi akrab dalam perbincangan di kalangan masyarakat. Sebab dalam situasi pada golongan kelas menengah kebanyakan yang di harapkan hal tersebut, uang merupakan alat sosialisasi politik yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih organisasi sosial politik. Selain itu, politik uang juga akan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka, sesuai dengan hati nurani, yang sesungguhnya merupakan esensi demokrasi.

Kalangan masyarakat Jawa Timur khususnya di daerah madura, tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dari dulu hingga sekarang masih menjadi pemimpin opini di tingkat masyarakat yang suaranya masih didengar. Oleh karna itu, tidak heran bila banyak pasangan tim sukses dan kandidat melakukan sebagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini sang tokoh, dengan harapan sang tokoh masyarakat tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat. Cara-cara ini merupakan cara yang sudah lumrah yang digunakan hampir seluruh para calon legislatif dan pertarungan arena perpolitikan Jawa Timur.

Kabupaten Bangkalan menjadi ranah perebutan perpolitikan untuk menguasai sebuah kekuasaan dan kedudukan seseorang untuk menempati sebuah posisi seorang pemimpin. Berdasarkan pada saat observasi awal dalam penelitian ada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, periode 2014/2019, yang resmi di lantik oleh Gubernur Jawa timur dan ketua DPRD Bangkalan. Ada 11 partai politik peserta pemilu legislatif (pileg) partai Gerindra

memperoleh 10 dalam kursi, disusul PDI-Perjuangan 7 kursi, PPP 6 kursi, Demokrat 6 kursi, PKB 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, PKS 3 kursi, Nasdem 1 kursi, dan PKPI 1 kursi. Dari lima puluh anggota DPRD tersebut ada anggota DPRD termuda berumur 23 tahun dari partai PDI-Perjuangan yang bernama M Husni Syakur. M Husni Syakur mencalonkan diri dari partai PDIP untuk menjadi anggota DPRD di Bangkalan. Lelaki kelahiran bangkalan agustus 1993 ini berkeinginan menampung aspirasi anak muda sebagai generasi muda dan penerus bangsa, M husni syakur terpilih menjadi anggota dewan pada tanggal 24 agustus 2014 ia terpilih bagian dapil 3 (Kokop, Konang, Tanjungsumber). hal inilah yang melatar belakangi peneliti dan penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri, sehingga peneliti ingin mengangkat penelitian tentang modal dalam kemenangan M Husni Syakur sebagai anggota DPRD termuda di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas sebagai tolak ukur dari penelitian ini dan juga berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana modal sosial Kemenangan M Husni Syakur hingga sukses menjadi caleg termuda di DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modal sosial yang digunakan saat masa pemilihan legislatif di Kabupaten Bangkalan sehingga ia bisa memenangkan pileg.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan saat masa pemilihan legislatif di Kabupaten Bangkalan sehingga ia bisa menang dalam pileg.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan ilmu atau teori yang diperoleh dari bangku kuliah dari praktek lapangan, sehingga bisa dipergunakan untuk membantu pemecahan masalah yang oleh masyarakat khususnya Daerah Bangkalan.
2. Untuk memperkaya wacana-wacana ilmiah dalam rangka mewujudkan trifungsi mahasiswa.
3. Untuk menambah bahan bacaan atau kepustakaan khususnya mengenai Strategi pemenangan M Husni Syakur sebagai anggota DPRD termuda di Kabupaten Bangkalan.

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dalam memecahkan masalah khususnya yang berkenaan dengan perilaku DPRD di dalam lingkungan sekitar kita. Lebih-lebih kepada masyarakat daerah Bangkalan sehingga perilaku mereka dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis atau moral yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Dimana disetiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan kebudayaan sehingga mereka patut untuk mentaati segala apa yang berada di dalamnya.

Manfaat lain dari penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk untuk membuat kebijakan dalam hal politik yang berkembang di masyarakat, sehingga politik kedepannya dapat menjadi perpolitikan yang lebih konsisten lagi terhadap sosialisasi yang digunakan oleh calon DPRD pada periode berikutnya.